PROSES SENGKETA TANAH DI MINANGKABAU
SUATU KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM
(KASUS SANGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM SUKU TANJUNG DI
KENAGARIAN MANGGOPOH KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT DENGAN PT.
MUTIARA AGAM)

Oleh

NAMA : RIKY AFDIARSYAH

EMAIL : afdiarsyahriky@gmail.com

BP : 2110003600280

Universitas Ekasakti -Padang

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Hal ini menyebabkan tanah menjadi salah satu sumber konflik yang potensial. Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik tanah dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan aktual. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat data pengaduan pada Komnas HAM pada tahun 2017 menunjukkan terjadi 181 kasus konflik tanah dalam berbagai bentuk.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris, susunan kehidupan masyarakatnyatermasuk perekonomiannya berasal dari hasil pertanian. Sebagai negara Agraris, tentunya masalah tanah memegang peranan penting karena tanah selain tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal dan

juga tanah perkuburan. Karena itu tanah juga tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Antara tanah dengan orang dan masyarakat terjadi hubungan yang bersifat religius berupa hak persekutuan dan hak perseorangan atas tanah.

Konflik tanah dalam masyarakat semakin marak dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Begitu pula yang terjadi di Sumatera Barat. Tingginya proporsi potensi konflik tanah di Sumatera Barat seiring dengan semakin pesatnya pembangunan perkebunan berskala besar semenjak akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Dari sebanyak 55 buah perusahaan perkebunan besar di seluruh Sumatera Barat yang mengontrol kira-kira 119.229 ha tanah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas nagari, semua perusahaan tersebut terlibat konflik dan tidak sedikit dari kasus konflik tersebut yang menjurus kepada aksi kekerasan.

Kabupaten Agam sebagai salah satu dari kabupaten-kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan yang banyak, juga tidak luput dari konflik. Salah satu konflik tanah di Kabupaten Agam yang mendapat perhatian masyarakat dan sorotan media adalah konflik tanah ulayat Suku Tanjung di kenagarian lubuk basung. Akhir-akhir ini sengketa lahan dan hutan antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH semakin mengemuka dan meluas. Berbagai kajian telah mengungkapkan bahwa permasalahan sengketa lahan hutan muncul sebagai akibat dari pengabaian hak-hak adat masyarakat atas hutan dan hasil hutan oleh perusahaan HPH. Masuknya modal-modal asing ke Nagari Manggopoh dalam menanamkan investasinya dibidang perkebunan kelapa sawit, menyeret masyarakat masyarakat Suku Tanjung dalam pusaran konflik. Masyarakat Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan

resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak.

Keberadaan hak-hak adat atas tanah (lahan) dan hutan berdasarkan hukum adat memang secara empiris dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Ahli hukum adat Indonesia, Ter Haar (1960: 56) mengemukakan: "Hubungan hidup antara ummat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak, yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya ummat itu dan karenanya tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya "serba berpasangan" (*participierend denken*) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) ummat manusia terhadap tanah."

Soepomo (1977: 3), ahli hukum adat Indonesia lainnya, juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Van Vollenhoven (dikutip oleh Soepomo, 1977: 11) berpendapat bahwa jikalau dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Van Vollenhoven menyusun 29 lingkaran hukum adat di Indonesia, yang menunjukkan beraneka warna hukum adat di Indonesia. Namun demikian van Vollenhoven (1972: 13) menyarankan bahwa lebih baik mengusahakan kodifikasi hukum adat dalam garis-garis besarnya saja sehingga kodifikasi itu dapat berlaku untuk wilayah seluas mungkin, dengan adanya ruang gerak bagi penyimpanganpenyimpangan setempat, yakni aturan-aturan yang khas

setempat tetap berlaku.

Keberadaan dan keberlakuan hukum adat pada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa hukum positif formal bukanlah satu-satunya wujud hukum. Dengan demikian pluralisme hukum (legal pluralism) memang sesuatu yang faktual. Dalam situasi sengketa, keberadaan dan keberlakuan pluralisme hukum menjadi lebih nyata. Fokus kajian ini adalah menyoroti kasus sengketa dengan perspektif antropologi hukum, bagaimana proses sengketa tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kenagarian Manggopoh

Nagari Manggopoh terletak di bagian barat Kabupaten Agam. Nagari Manggopoh memiliki luas 118,2 km² atau 35,57 % dari luas Kecamatan Lubuk Basung (332,51 km²) yang terdiri dari 8 buah jorong. Penguasaan tanah ulayat suku di Nagari Manggopoh berdasarkan sistem “ganggam baumpuak, pagang bamasing”, artinya ulayat suku yang dipegang oleh para penghulu dalam suku dengan mandat hak malintau (mengawasi). Menurut norma-norma adat yang berlaku, posisi dan kejelasan letak tanah ulayat masing-masing suku didasarkan atas kaba (informasi lisan secara turun temurun) dari nenek moyang.

Masyarakat Suku Tanjung terdiri dari 7 orang penghulu, yakni kaum Dt.Bintaro Hitam, Dt.Bintaro Rajo, Dt.Majo Sati, Dt.Ganto Suaro, Dt.Talut Api, Dt. Mangkudun dan Dt. Rajo Mangkuto. Berdasarkan dokumen sanak kemenakan Pasukuan Tanjung Manggopoh menjelaskan bahwa posisi dan kejelasan letak tanah ulayat Suku Tanjung berdasarkan kaba yang dihapalkan secara turun temurun oleh para

pemangku adat. Kepemilikan tanah ulayat Suku Tanjung ini diperkuat dengan keluarnya Keputusan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung No. 27/KAN-MG/1986 tanggal 7 Agustus 1986, yang membuktikan pengakuan dan keberadaan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh seluas lebih kurang 12.000 ha lengkap dengan batas-batasnya.

2. Konflik Masyarakat Suku Tanjung dengan PT. Mutiara Agam

Pada tahun 1983, PT. Mutiara Agam masuk berinvestasi di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Perusahaan tersebut mencari lahan seluas 10.000 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Setelah diukur kelapangan ternyata dalam 8.000 Ha tanah yang dicadangkan tersebut, terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh. Pihak Ninik Mamak Suku Tanjung melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam bahwa tanah yang dicadangkan untuk perusahaan tersebut ada terdapat tanah ulayat Suku Tanjung, namun laporan itu tidak pernah ditanggapi secara positif, arif dan bijaksana.

Berhubung tidak adanya tanggapan dari pihak perusahaan dan Muspida Agam, maka permasalahan ini dilaporkan kepada pejabat dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat di Padang. Pada tanggal 12 April 1984 para ninik mamak Suku Tanjung Manggopoh diundang ke Padang guna memberikan penjelasan dimana sebenarnya letak tanah ulayat Pasukuan Tanjung tersebut. Pihak perusahaan kemudian melakukan negosiasi dengan ninik mamak Suku Tanjung pada tahun 1985 dimana suku Tanjung Manggopoh menyepakati areal tanah yang akan dijadikan perkebunan sawit seluas $\pm$ 2000 ha. Pada tahun 1998, PT. Mutiara Agam mengadakan lagi pertemuan dengan Ninik Mamak suku Tanjung yang menghasilkan surat perjanjian tertanggal 2 Juli 1988. Namun, ninik mamak Suku Tanjung yang

merasa tertipu dan melakukan tuntutan terhadap PT. Mutiara Agam. Konflik yang semula bersifat laten kemudian muncul ke permukaan dipicu oleh surat dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) Nomor: R-604/V/1987. Surat tersebut dikeluarkan oleh BAKIN perihal data manipulasi Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh oleh oknum-oknum Pemerintah di lingkungan Pemda Sumatera Barat, khususnya di lingkungan Pemda Kabupaten Agam.

Pada tahun 2003, konflik pecah antara Suku Tanjung dan PT. Mutiara Agam, dimana terjadi demonstrasi dan penggalangan massa yang besar dari seluruh Masyarakat Suku Tanjung Manggopoh kepada Pemda Agam dan Polres Agam. Pada tanggal 11 Juni 2008, Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu sebagai penguasa tanah ulayat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah ulayat Suku Tanjung dan menghukum PT. Mutiara Agam untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Suku Tanjung serta membayar ganti kerugian materil dan kerugian immaterial.

Gejolak konflik meningkat tinggi ketika memasuki akhir tahun 2009 sampai pada awal tahun 2010. Berpegang pada keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, masyarakat Pasukuan Tanjung Manggopoh melakukan aksi pendudukan terhadap lahan yang disengketakan. Konflik semakin membara karena masyarakat Suku Tanjung Manggopoh maupun pihak perusahaan merasa mempunyai kekuatan hukum untuk saling serang. Pada tanggal 11 Agustus 2009, PT.Mutiara Agam dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang dan pada tanggal 13 Januari 2010, Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan banding PT.Mutiara Agam dan menolak gugatan dari Suku Tanjung Pada 8 Februari 2010, Suku Tanjung mengajukan upaya upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Suku Tanjung. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Maret 2011, Suku Tanjung Manggopoh mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui PK MA No.749 PK/Pdt/2011 memenangkan gugatan Suku Tanjung Manggopoh. Kendati pun sudah jelas keputusan dari hukum positif oleh institusi yang berwenang, konflik masih belum berakhir, bahkan makin memanas ketika dilakukan pelaksanaan eksekusi lahan.

Sengketa antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH akan dapat dipahami lebih baik apabila dapat ditemukan akar permasalahannya. Penemuan akar permasalahan hanya dapat dilakukan apabila dikenali beragam acuan hukum (pluralisme hukum, legal pluralism) yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pengenalan beragam acuan hukum menjadi relevan karena pihak-pihak yang bersengketa kemungkinan menggunakan acuan hukum yang berbeda, sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan acuan hukum tunggal, misalnya hukum positif semata-mata. Pengenalan pluralisme hukum dan penggunaannya oleh pihak-pihak yang bersengketa dapat menunjukkan bagaimana strategi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memenangkan sengketa tersebut dan apa konsekuensinya pada penyelesaian sengketa.

3. Antropologi Hukum

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis terutama, antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas, dikenal sebagai Antropologi Hukum. Antropologi hukum dalam kajiannya mempelajari hubungan timbale - balik antara hukum dengan fenomena - fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologi mengenai hukum memberi perhatian pada segi - segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial. Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses - proses sosial dimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah bahwa awal pemikiran antropologi tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861, beliau dipandang sebagai peletak dasar studi antropologi tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (the evolutionistic theory) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan : hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana/bersahaja (primitive), tradisional, dan kesukuan (tribal) ke

masyarakat yang kompleks dan modern, dimana hukum yang inherent dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Tema kajian pada fase awal studi - studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologi lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (primitive), tradisional (traditional), dan kesukuan (tribal) dalam skala evolusi bentuk - bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia, sedangkan metode kajian yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai armchair methodology, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk, dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin documentary data yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan - laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya (F. von BendaBeckmann, 1989).

Pada awal abad ke-20 metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan (fieldwork methodology) dalam studi - studi antropologis tentang hukum. Karya Barton, misalnya, yang berjudul Ifugao Iflw yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil dari fieldwork yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon Philipina. Kemudian, muncul karya Malinowski berjudul Crime and Custom in Savage Society yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasifik, dan seterusnya sampai sekarang metode fieldwork menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum.

Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu ?, apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan ?, bagaimanakah hukum berwujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat ?. Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme - mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana atau bersahaja. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel bertajuk *The Cheyenne* (1941) merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli masyarakat suku Cheyenne (suku, Indian) di Amerika Serikat. Kemudian, Hoebel mempublikasikan *The Law of Primitive Man* (1968), disusul dengan karya Gluckman mengenai hukum orang Barotst, dan Lozi di Afrika, karya Bohannan mengenai hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapauku di Papua.

Fase perkembangan tema studi antropologi hukum kearah mekanismemekanisme penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of dispute settlements*. Pada dekade tahun 1960-an tema studi - studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama - tama difokuskan pada kemajemukan cara - cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negaranegara yang sudah merdeka. Karya Bohannan, Gluckman, dan Gulliver missalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum

Negara - negara sedang berkembang,

Sejak tahun 1970-an tema studi - studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia, melalui Berkeley Village Law Projects, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum. Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von Benda-Beckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat di pengadilan negeri di Sumatera Barat.

Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan, dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial (social security), pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Studi-studi ini dikembangkan oleh Agrarian Law Department Wageningen Agriculture University. Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik - topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa, interaksi antara hukum

negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von BendaBeckmann (1989) sebagai fase the anthropology of legal pluralism. Kecenderungan yang berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi antropologi hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (state law) dengan hukum rakyat (folk law) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa.

Model Antropologi Hukum yaitu holistik dengan latar belakang budaya hukum dari masyarakat setempat. Ini memberikan gambaran bahwa hukum tidak hanya dilihat pada persoalan berundangan (normatif) atau hukum adat melainkan ada peran budaya. Peran tersebut dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dengan budaya yang tertanam. Hukum tidak bisa melihat nilai budaya tersebut tanpa mempelajari Antropologi Hukum sebab pendekatan dari penyelesaian masalah ini memerlukan pemahaman latar belakang budaya setempat.

Sengketa merupakan permasalahan peradilan yang harus diselesaikan. Menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio, peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk memegakan hukum dan keadilan. Umumnya seseorang mendapat keadilan melalui pengadilan yang mendapat naungan dari Mahkamah Agung. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa pengadilan adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan tetapi itu juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai nilai yang terkandung dalam peraturan hukum.

Model antropologi hukum telah diterapkan dalam kasus ini. Secara konflik struktural, antropologi hukum melihat bahwa sengketa tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat. Setelah ditelusuri secara historis, konflik tersebut merupakan warisan dari kebijakan masa lalu yang belum ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Ini menjadikan rakyat korban konflik/sengketa terus menerus dilanda konflik agraria tanpa adanya penyelesaian, dikarenakan kebijakan pemerintah dan pihak pemilik hutan tidak menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar (Kinasih, 2016).

Pada hakekatnya Proses Sengketa Antropologi Hukum adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian suatu sengketa. Proses penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Jadi Proses Sengketa Antropologi Hukum adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data/fakta (berproses) terhadap suatu sengketa sehingga diperoleh hasil penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Model-model penyelesaian sengketa (*modes of settlement*) yang lajim digunakan adalah (Nader dan Todd, 1978: x) arbitrase, negosiasi, mediasi, judikasi, paksaan (*coercion*), dan penghindaran (*avoidance*). Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara

perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Berdasarkan pandangan diatas, maka hukum dalam perspektif antropologis merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971) sehingga, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

Karakter khas lain dari antropologi hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada prosesproses mikro (micro processes) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu. metode holistik dalam mengkaji pluralisme hukum dalam masyarakat sangat memhantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial. ideologi. Implikasi dari karakteristik metodologi antropologi hukum seperti disebutkan di atas adalah : jika studi - studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh-menyeluruh dan holistik, maka studi antropologi hukum harus difokuskan paling tidak pada empat aspek kajian pokok sebagai satu kesatuan, yaitu mulai dari kajian :

1. Proses Pembuatan Hukum (Law Making Process)

2. Norma Hukum / Peraturan Perundangundangan (Legal Norms)

3. Pelaksanaan Hukum (Law Implementation/Application)

4. Penegakan Hukum (Law Enforcement).

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum akan memberi pemahaman bagaimana pertarungan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, religi, termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (Negara - negara / lembaga - lembaga internasional) mempengaruhi masa - masa perdebatan dan pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan mensahkan (dari lembaga eksekutif) suatu produk hukum negara (state law). Selain itu, akan diamati dan dicermati apakah proses pembuatannya sudah melalui mekanisme yang benar, seperti dimulai dengan membuat background paper, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya; apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (public consultation) oleh eksekutif dan dengar pendapat (hearing sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen stakeholders sebelum persetujuan oleh legislatif dan pengesahan oleh eksekutif dilakukan. Dengan demikian, proses-proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma - norma hukumnya. Kajian pada tingkatan norma - norma hukumnya, produk peraturan perundang - undangan, akan memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip - prinsip yang dianut dari suatu produk hukum / peraturan perundang - undangan. Kaitan dengan studi antropologi hukum yang berfokus pada pluralisme hukum, akan dicermati apakah prinsip - prinsip penting, seperti: informed-consent

principle, prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal (indigenous tenurial rights), dan prinsip pengakuan atas kamajemukan hukum (legal pluralism) sudah diatur secara eksplisit dalam norma - norma hukumnya.

C. PENUTUP

Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerja lapangan (fieldwork methodology) untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa. Oleh karena itu kasus - kasus sengketa sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri hukum masyarakat dalam studi antropologis mengenai hukum. Hal terjadi karena hukum bukan semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukan sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiris, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal
Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.